

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
AKHIR TAHUN
2022**



PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL

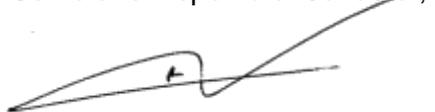
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Akhir Tahun 2022 unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai perwujudan peran dan layanan pada Tahun 2022 sebagai *quality assurance* dan *advisory services*. Laporan Tahun 2022 ini bukan sekedar formalitas kewajiban pemenuhan pertanggung jawaban tetapi merupakan segala upaya dan jerih payah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam tahun mendatang. Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2022, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal di lingkup Kementerian Hukum dan HAM harus terus berbenah diri. Masih banyak yang memerlukan optimalisasi sehingga pengawasan yang dilaksanakan lebih efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*). Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.



Jakarta, 30 Desember 2022

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



R. Natanegara K.P.

NIP 197309081999031001

ABSTRAK

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2022 mengemban Program Dukungan Manajemen yang mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemnetraian Hukum dan HAM yang dijabarkan pada 7 (tujuh) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Kegiatan Dukungan Manajmeen Sekterariat Inspektorat Jenderal. Di level Program dilaksanakan melalui arahan dan pembinaan serta korodinasi pimpinan baik internal Inspektorat Jenderal, maupun terhadap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan juga koordinasi eksternal dengan Instansi terkait seperti BPK, BPKP, KEMENPANRB, BKN, KPK dan Instansi lainnya. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan intern Tahun 2022 antara lain sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam hal ini kompetensi auditor yang belum merata, keterbatasan sumber daya APIP yang mengerti tentang Teknologi Informasi menjadi tantangan Inspektorat Jenderal dalam mengimplementasikan kinerja di era Teknologi 5.0. Keterbatasan lainnya terkait sarana prasarana pengawasan. Laporan Akhir Tahun 2022 ini menggambarkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Maturitas penyelenggaraan SPIP, dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan capaian lainnya serta rangkuman kegiatan pengawasan (audit, reviu, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen) selama Tahun 2022.

Kata Kunci: IKU, IKK, RB, SPIP, SAKIP, Pengawasan (audit, reviu, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen).

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam pasal 318 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM bahwa kedudukan dan tugas fungsi Inspektorat Jenderal adalah Kedudukan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern, dan mempunyai fungsi penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan, pelaksanaan Pengawasan Intern, pengawasan untuk Tujuan Tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Menteri. Pengawasan internal tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya dalam mengawal peningkatan kualitas laporan keuangan, Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan integritas pegawai. Pengawasan intern dilaksanakan agar harmoni dalam gerak dan langkah melaksanakan kolaborasi untuk mencapai target kinerja yang menjadi amanah RPJMN ke IV Tahun 2022-2024 dan mendukung pencapaian program-program prioritas Kementerian Hukum dan HAM.

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan *best practice* mengenai peran dan fungsi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan system pengendalian internal yang kuat melalui :

- a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan Pelaksana audit kinerja, audit kepatuhan (*compliance*) dan audit investigasi yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- b. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko.
- c. Pelaksana pendampingan/ rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akhir Tahun 2022 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, pelaporan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selama satu tahun termasuk capaian kerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan masukan dan bahan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tahun berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selama Tahun 2022 meliputi capaian sasaran dan target Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja, Perjanjian Kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), penyelenggaraan SPIP, penyelenggaraan Manajemen Risiko, pelaksanaan SAKIP, implementasi Program Unggulan dan capaian lainnya serta rangkuman kegiatan pengawasan (audit, reuiu, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen) yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2022.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja, dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 Setember Th.2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 Setember Th.2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama kementerian Hukum dan HAM.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 Setember Th.2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Th.2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP kemenkumham Th.2021-2024.

BAB. II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam RPJMN ke IV Th 2022-2024 bahwa Presiden terpilih menyampaikan hanya ada satu visi dan misi yaitu Visi Misi Presiden yang capaian targetnya diturunkan ke dalam program Kementerian/Lembaga/Pemda. Visi dan Misi Presiden sebagai berikut :



Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai mana Visi dan Misi Presiden sebagai berikut :



Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :



Visi Inspektorat Jenderal mengemban Visi kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Misinya mengemban Misi ke 7 dan Tujuan Kemenkumham No.7, yaitu



Selanjutnya berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan sasaran Strategis Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis yang diamanatkan kepada Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

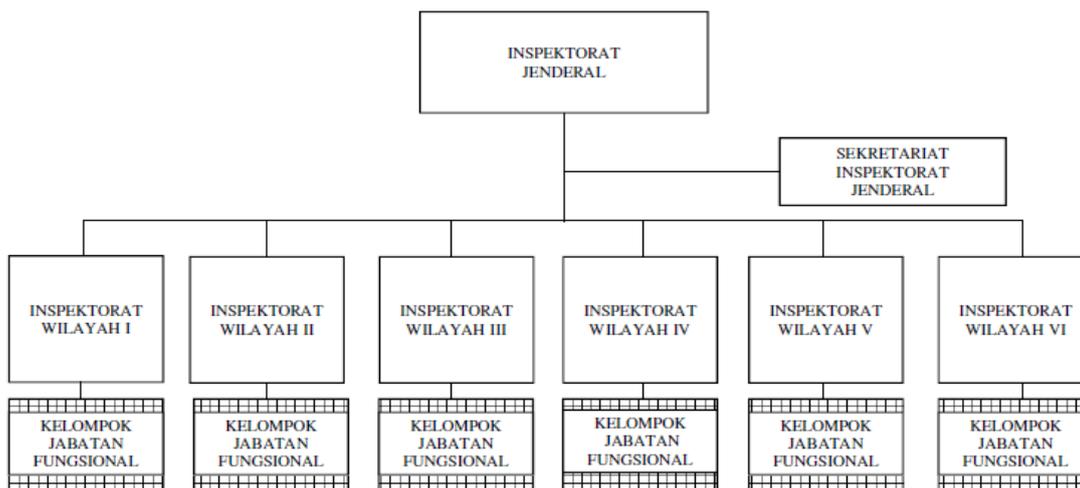
Penetapan Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Penanggungjawab
1	Nomor 1 : Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Nomor 1 : Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan hukum masyarakat	01 - Indeks Kualitas Regulasi	SS1 : Terperuhnya Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	01 - Indeks Kualitas Regulasi	Ditjen PP dan BPHN
			02 - Indeks Reformasi Hukum		02 - Indeks Reformasi Hukum	
2	Nomor 2 : Menyempurnakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas	Nomor 3 : Tertaksananya pelayanan publik di bidang hukum yang sesuai dengan prinsip standar pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Ditjen KI, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi
			Nomor 4 : Mewujudkan pelayanan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional		01 - Indeks Layanan Administrasi Hukum Umum yang Mendukung Kemudahan Berusaha	
			02 - Persentase peningkatan permohonan KI dalam negeri	SS5 : Meningkatkan permohonan KI dalam negeri	02 - Persentase peningkatan permohonan KI dalam negeri	Ditjen KI
3	Nomor 3 : Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Kewarganegaraan, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Nomor 8 : Mewujudkan otoritas pusat yang mendukung penegakan hukum lintas batas negara melalui penempatan pemertanian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi secara efektif dan tepat sasaran	Indeks Efektivitas Otoritas Pusat	SS6 : Terwujudnya otoritas pusat yang efektif dan efisien	Indeks Efektivitas Otoritas Pusat	Ditjen AHU
			Nomor 10 : Terwujudnya penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Imigrasi dan Kekayaan Intelektual yang berkeadilan		01 - Tingkat Resolusi	
			02 - Indeks Penegakan Hukum Kewarganegaraan	02 - Indeks penegakan hukum kewarganegaraan	Ditjen Imigrasi	
	03 - Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	03 - Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Ditjen KI			

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Penanggungjawab	
4	Nomor 4 : Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	Nomor 2 : Tertaksananya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia (PAHAM) di Indonesia	Indeks HAM Indonesia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan HAM	01 - Indeks HAM Indonesia	Ditjen HAM dan Ditjen Pemasyarakatan	
					02 - Indeks Pelayanan Tahanan		Ditjen Pemasyarakatan
					03 - Indeks Pengelolaan Bahan Baran		
5	Nomor 5 : Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Nomor 7 : Terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum dan memperoleh akses keadilan yang merata	01 - Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat	SS8 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	01 - Indeks kesadaran hukum masyarakat	BPHN	
			02 - Indeks efektivitas bantuan hukum		02 - Indeks efektivitas bantuan hukum		
6	Nomor 6 : Iktif Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Kewarganegaraan dan Pemasyarakatan	Nomor 6 : Terwujudnya ketertiban, stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI melalui fungsi kewarganegaraan dan pemasyarakatan	01 - Indeks Keamanan dan Keterlibatan Pemasyarakatan	SS7 : Iktif berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	01 - Indeks Keamanan dan Keterlibatan Pemasyarakatan	Ditjen Pemasyarakatan	
			02 - Indeks pengamanan kewarganegaraan		02 - Indeks pengamanan Kewarganegaraan		Ditjen Imigrasi
7	Nomor 7 : Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kerebagan	Nomor 8 : Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi Strategis SDM Bidang Hukum dan HAM	Melaksanakan Pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih melalui peningkatan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	SS9 : Meningkatkan Profesionalitas dan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	01 - Indeks profesionalitas ASN	Setjen dan Bpsdm	
					02 - Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum dan HAM		BPSDM
		Nomor 9 : Terbangunnya Budaya Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang Bermartabat, Efektif dan Efisien	01 - Nilai Reformasi Birokrasi	SS10 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang bermartabat, efektif dan efisien	01 - Nilai Reformasi Birokrasi	Setjen	
			02 - Indeks martabat SPP		02 - Indeks martabat SPP	Setjen	
			03 - Opini atas Laporan Keuangan		03 - Opini atas Laporan Keuangan	Setjen	
	04 - Indeks integritas	04 - Indeks integritas	Ijen dan Setjen				
	05 - Indeks kualitas kebijakan	05 - Indeks kualitas kebijakan	Balibang Hukum dan HamBSK				

Inspektorat Jenderal mengemban Misi No.7 (Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan) dan Tujuan No.9 (Terbangunnya Budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien) serta Sasaran Strategis No.10 (Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi, efektif dan efisien), dengan indikator yaitu Indeks Integritas.

B. STRUKTUR ORGANISASI



C. SUMBER DAYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Bezetting keadaan pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester II Tahun 2022 adalah sebanyak 277 pegawai. Selama tahun 2022 terjadi Mutasi (penambahan dan pengurangan) pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham yaitu terjadi Mutasi/Promosi sebanyak 9 pegawai mutasi keluar, 8 pegawai mutasi ke dalam, 31 pegawai mutasi internal, 6 pegawai masa purna bakti/pension dan 72 pegawai Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober. Bezetting pegawai per 19 Desember 2022 sebagai berikut :

Per Jenis Kelamin

Laki-Laki	149	Orang
Perempuan	128	Orang
TOTAL	277	Orang

Per Jenis Jabatan

1	Pimpinan Tinggi Madya	1	Orang
2	Pimpinan Tinggi Pratama	6	Orang
3	Pejabat Administrator	2	Orang
4	Pejabat Pengawas	8	Orang
5	Pejabat Fungsional Auditor	165	Orang
6	Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	8	Orang
7	Pejabat Fungsional Arsiparis	6	Orang
8	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	4	Orang
9	Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	4	Orang
10	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	1	Orang

11	Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	2	Orang
12	Pejabat Fungsional Analis Anggaran	1	Orang
13	Pejabat Fungsional Analis Hukum	4	Orang
14	Pejabat Fungsional Perencana	1	Orang
15	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	3	Orang
16	Pejabat Pelaksana	57	Orang
17	CPNS	4	Orang
Total		277	Orang

Per Jenis Pangkat/ Golongan Ruang

Pangkat		Jumlah	
Pembina Utama (IVe)		1	Orang
Pembina Utama Madya (IVd)		5	Orang
Pembina Utama Muda (IVc)		9	Orang
Pembina Tingkat I (IVb)		15	Orang
Pembina (IVa)		20	Orang
Penata Tingkat I (IIIId)		28	Orang
Penata (IIIc)		35	Orang
Penata Muda Tingkat I (IIIb)		67	Orang
Penata Muda (IIIa)		90	Orang
Pengatur Tingkat I (IIId)		0	Orang
Pengatur (IIc)		6	Orang
Pengatur Muda Tingkat I (IIb)		1	Orang
Pengatur Muda (IIa)		0	Orang
TOTAL		277	Orang

Per Unit Esleon II

Wilayah / Bagian		Jumlah	
Ijen dan Ses. Itjen		2	Orang
Inspektorat Wilayah I		35	Orang
Inspektorat Wilayah II		30	Orang
Inspektorat Wilayah III		32	Orang
Inspektorat Wilayah IV		29	Orang
Inspektorat Wilayah V		28	Orang
Inspektorat Wilayah VI		33	Orang
Kepegawaian		17	Orang
Program dan Pelaporan		10	Orang
Keuangan		16	Orang
Humas dan Sistem Informasi Pengawasan		20	Orang
Umum		21	Orang
CPNS		4	Orang
Total		277	Orang

Per Jumlah Auditor

1	Auditor Yang Sudah Pengangkatan	165	Orang
2	PNS dengan Formasi CPNS Jabatan Auditor (Belum Dilantik)	1	Orang
Total		166	Orang

Per Jenis JFA Jabatan Fungsional Auditor :

1	Auditor Utama	1	Orang
2	Auditor Madya	34	Orang
3	Auditor Muda	29	Orang
4	Auditor Pertama	97	Orang
5	CPNS dengan Jabatan Auditor Tahun 2017	1	Orang
6	Auditor Penyelia	1	Orang
7	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	Orang
8	Auditor Pelaksana	1	Orang
Jumlah Auditor		166	Orang

PerJabatan Fungsional Lainnya :

1	Analisis Kepegawaian Madya	1	Orang
2	Analisis Kepegawaian Muda	4	Orang
3	Analisis Kepegawaian Pertama	3	Orang
4	Arsiparis Muda	2	Orang
5	Arsiparis Pertama	4	Orang
6	Pranata Komputer Madya	1	Orang
7	Pranata Komputer Muda	1	Orang
8	Pranata Komputer Pertama	2	Orang
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	1	Orang
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	3	Orang
11	Analisis Kebijakan Muda	1	Orang
12	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1	Orang
13	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	Orang
14	Analisis Anggaran Muda	1	Orang
15	Perencana Muda	1	Orang
16	Analisis Hukum Pertama	4	Orang
17	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	3	Orang
18	CPNS Pranata Komputer	1	Orang
19	CPNS Analisis Hukum	1	Orang
20	CPNS Analisis Anggaran	1	Orang
Jumlah JFT Lainnya		37	Orang

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

1	Pengemudi	11	Orang
2	Pramubakti	11	Orang
3	Tenaga Kebersihan	8	Orang
4	Helper	3	Orang
Total		33	Orang

Selain itu dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan, Aktif Belajar, *focus group discussion*, workshop yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat Jenderal TA.2022 No. SP DIPA-013.02.1.409241/2022 dengan pagu awal Inspektorat Jenderal

yang semula Rp76.877.008.000,-. Selanjutnya dari pagu tersebut mendapat blokir *Auto Adjustmnet* sebesar Rp19.240.569.000,- kemudian dilakukan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp868.000.000.- Selanjutnya bulan Oktober 2022 diajukan buka blokir sebesar Rp1.721.061.000, sehingga pagu DIPA per Desember 2022 menjadi Rp60.225.500.000,-. Dalam upaya optimalisasi kegiatan dan anggaran serta optimalisasi peningkatan nilai SMART dan IKPA, pada DIPA Inspektorat Jenderal dilakukan revisi sebanyak 8 kali, sebagai berikut :

No	Revisi DIPA	Nominal (Rp)	Tanggal	Keterangan
1	Revisi I DIPA	Pagu Awal 76.877.008.000	15 Desember 2021	Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS: 8339-4622-7041-0076)
		Pagu Menjadi 59.689.822.000		
Keterangan : Revisi ke-I disebabkan adanya pencadangan anggaran belanja <i>Automatic Adjustment</i> ke-1 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19				
2	Revisi II DIPA	Pagu Menjadi 59.429.422.000	31 Maret 2022	Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS: 6275-0390-6345-6995)
Keterangan : Revisi ke-II disebabkan adanya buka blokir belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
3	Revisi III DIPA	Pagu Menjadi 59.429.422.000	27 April 2022	Kewenangan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS: 6275-0390-6345-6995)
Keterangan : Revisi ke-III disebabkan adanya pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) atau dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang sama				
4	Revisi IV DIPA	Pagu Menjadi 57.636.439.000	4 Juni 2022	Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS:2013-3630-7505-7104)
Keterangan : Revisi ke-IV disebabkan adanya pencadangan anggaran belanja <i>Automatic Adjustment</i> ke-2 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19				
5	Revisi V DIPA	Pagu Menjadi 57.636.439.000	27 Juni 2022	Kewenangan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS:2013-3630-7505-7104)
Keterangan : Revisi ke-V disebabkan adanya pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) atau dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang sama				
6	Revisi VI DIPA	Pagu Menjadi 58.504.439.000	19 Agustus 2022	Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS:9702-2987-2437-8151)
Keterangan : Revisi ke-VI disebabkan adanya penambahan kekurangan Belanja Pegawai sebesar Rp868.000.000				
7	Revisi VII DIPA	Pagu Menjadi 60.225.500.000	16 September 2022	Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS:2099-8097-5152-2699)
Keterangan : Revisi ke-VII disebabkan adanya pembukaan blokir <i>Automatic Adjustment</i> pada beberapa Inspektorat Wilayah dengan total Rp1.721.061.000				
8	Revisi VIII DIPA	Pagu Menjadi 60.225.500.000	4 Oktober 2022	Kewenangan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2022 (DS:2099-8097-5152-2699)
Keterangan : Revisi ke-VIII disebabkan adanya pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) atau dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang sama				

9	Revisi IX DIPA	Pagu Menjadi 60.225.500.000	4 November 2022	Kewenangan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SP DIPA- 013.02.1.409241/2022 (DS:2099- 8097-5152-2699)
Keterangan : Revisi ke-IX disebabkan adanya pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) atau dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang sama				
9	Revisi X DIPA	Pagu Menjadi 60.225.500.000	5 Desember 2022	Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA- 013.02.1.409241/2022 (DS:7558- 6297-2401-7829)
Keterangan : Penghapusan anggaran <i>Automatic Adjustment</i> yang melekat pada Pagu DIPA				

Realisasi belanja Inspektorat Jenderal, berdasarkan data SAKTI per 29 Desember 2022 sebesar 98,59% dengan rincian sebagai berikut :

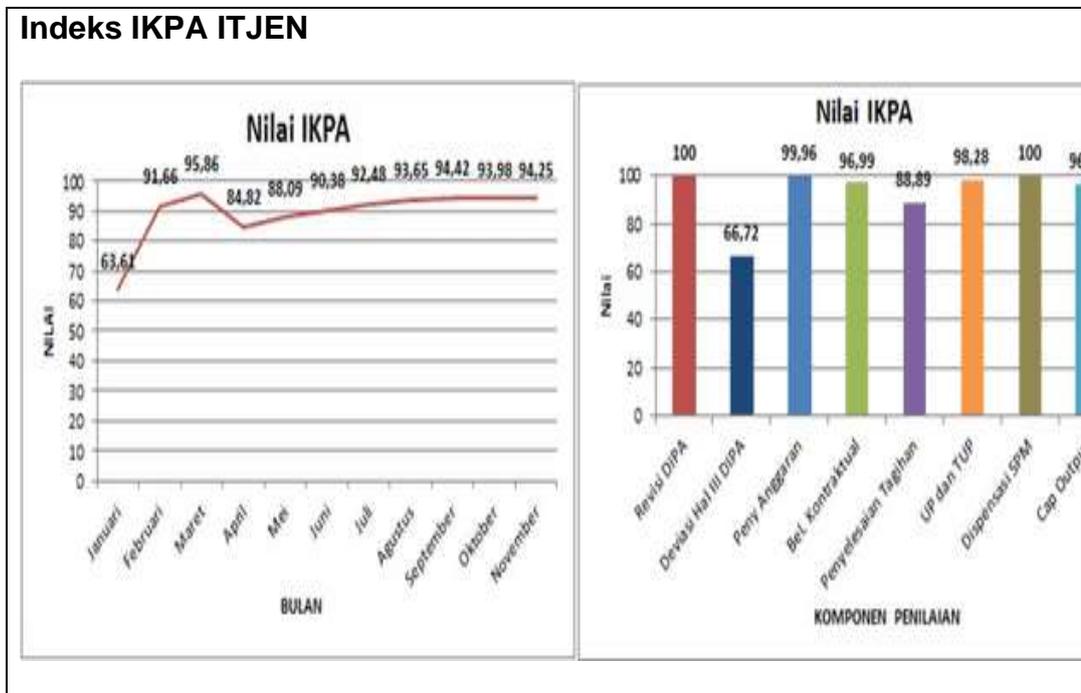
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	19.147.385.000	18.661.599.327	97,46%
Belanja Barang Operasional	7.019.487.000	6.844.860.660	97,51%
Belanja barang non operasional (tusi)	34.058.628.000	33.868.348.198	99,44%
Belanja Modal	0	0	0%
TOTAL	60.225.500.000	59.374.808.185	98,59%

Ket : Realisasi per 29 Desember 2022 berdasarkan SAKTI

Per Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	60.225.500.000	59.374.808.185	98,59%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	4524584000	4502105582	99,50%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	4788899000	4769515115	98,05%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	4865029000	4844272223	99,57%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	4317751000	4310739640	99,84%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	4197619000	4181579399	99,62%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	5740232000	5733574800	99,88%
Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat ITJEN	31791386000	31033021426	97,61%

Nilai SMART dan

IKPA Inspektorat Jenderal :

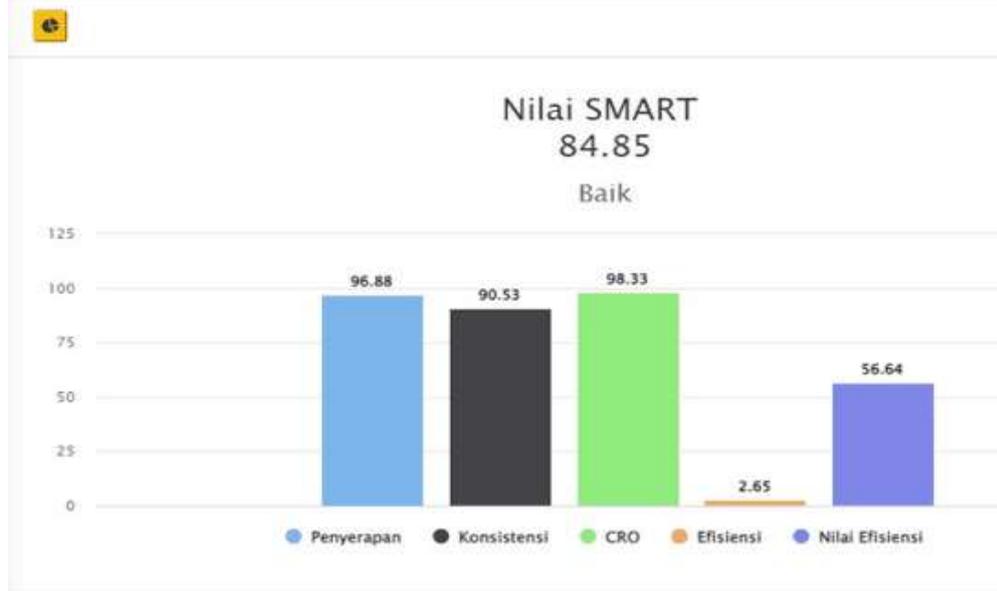


Nilai IKPA sebesar 94,25 (baik) per 29 Desember 2022

Indeks SMART ITJEN



- Capaian sasaran Program = 100 (terpenuhi target)
- Penyerapan per 29 Des 2022 =98.88%
- Nilai Konsistensi =90,53 (realisasi dengan RPD)
- Capaian output program=100 (terpenuhi target)
- Efisiensi =13,61 dalam range -20 dan +20
- Nilai Efisiensi =84.025
- Nilai Kinerja Anggaran (NKA)=84,85 (cerminan nilai SMART Satker Itjen)



**Nilai SMART ITJEN
Sebagai Satker= 84.85**

- Penyerapan per 29 Des 2022 =98.88%
- Nilai Konsistensi =90,53 (realisasi dengan RPD)
- Nilai CRO=98,33
- Efisiensi =2,65
- Nilai Kinerja Anggaran (NKA)=56,64

3. SUMBER DAYA PERATURAN

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2022, mengajukan program penyusunan perundang-undangan melalui ijin prakarsa sebagai berikut :

- Telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Progres revisi Permenkumham ini masih dalam berproses pembahasan diinternal Inspektorat Jenderal yang sampai dengan Desember 2022 belum finalisasi dikarenakan kesibukan masing-masing personil Tim dan belum terdapat persepsi yang sama terkait beberapa pasal didalamnya.

- c. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Progres revisi RPermenkumham ini masih berproses awal di Internal Itjen, baru 4 kali pembahasan dengan tim internal, yaitu sampai pasal 11 dari 58 pasal. Selanjutnya setelah seluruh pasal selesai maka akan di sosialisasikan ke jajaran Kemenkumham atas draft dimaksud untuk memperoleh masukan dan saran perbaikan. Di Tahun 2022 Inspektorat Jenderal memiliki sumber daya peraturan lainnya memiliki 164 SOP yang dapat di unduh di link <https://esop.kemenkumham.go.id> sebagai berikut :



D. PELAKSANAAN SPIP, SAKIP, REFORMASI BIROKRASI , MANAJEMEN RISIKO dan PROGRAM UNGGULAN

1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Inspektorat Jenderal

Sebagai satuan kerja, Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 bahwa setiap satuan kerja wajib menyelenggarakan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan tersebut secara berkala. Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal meliputi 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern, melalui tahapan kegiatan Pemahaman (*Knowing*), Pemetaan (*Diagnostic Assessment*), Penilaian Risiko tingkat entitas program dan kegiatan, Pembangunan infrastruktur (*norming*), Internalisasi/ Implementasi (*forming*) dan pengembangan

berkelanjutan melalui penilaian maturitas SPIP oleh APIP, menindaklanjuti rekomendasi APIP atas temuan evaluasi SPIP Inspektorat Jenderal, menyusun laporan Triwulan SPIP, melakukan internalisasi SPIP melalui workshop, menyusun Rencana Aksi Rekomendasi Manajemen Risiko, melakukan monev dan menyusun Laporan Monev atas hasil rencana aksi manajemen risiko serta menyusun laporan tindaklanjut atas hasil monev rekomendasi manajemen risiko per triwulan.

2) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Inspektorat Jenderal.

Sebagai Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan dan perjanjian kinerja meliputi penyusunan konsep RENSTRA yang di dalamnya memuat Aspek Strategis Organisasi, Pemasalahan Utama, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan serta menyusun Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran. Yang kemudian dilakukan monitoring atas Capaian Kinerja Organisasi melalui aplikasi Smart-DJA pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart> dan aplikasi Monev RKP Bappenas pada website <https://e-monev.bappenas.go.id/2022> dan [aplikasi e-performance.kemendiknas.go.id](http://aplikasi.e-performance.kemendiknas.go.id). Selanjutnya dilakukan analisis atas capaian kinerja dimaksud dan dituangkan dalam LKIP Inspektorat Jenderal Th.2022. Sebagai APIP telah melaksanakan worksop SAKIP dan melakukan evaluasi SAKIP pada 11 Unit Eselon I dan reuiu LKIP Kementerian. Telah juga ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Th.2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Th.2020-2024.

3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal.

Sebagai Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Th.2022 yang dilakukan monitoring capaian nya per triwulan serta menginput data dukung dalam aplikasi e-rb.kemendiknas dan e-pmprb, meliputi 8 (delapan) unsur percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sebagai APIP telah melaksanakan worksop PMPRB dan melakukan evaluasi PMPRB pada 11 Unit Eselon I.

4) Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal.

Sebagai Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal menyusun Penerapan Manajemen Risiko Th.2022 berpedoman pada Permenkumham No.5 Th.2018 meliputi Piagam Manajemen Risiko, Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Analisis Risiko, Penanganan/Mitigasi Risiko dan Pemantauan Risiko. Penerapan Manajemen

Risiko disusun pada level program Inspektorat Jenderal, level Kegiatan Inspektorat Wilayah dan level Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selanjutnya dilakukan Pemantauan atas penanganan risiko persemester dan diakhir tahun disusun Laporan Penerapan Risiko Th.2022. Sebagai APIP telah melaksanakan *workshop* Manajemen Risiko dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bimtek penyusunan Manajemen Risiko dengan peserta para auditor, pendampingan penyusunan risiko kepada Kantor Wilayah.

BAB. III

HASIL YANG DICAPAI

A. CAPAIAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Periode Rencana Strategis Th.2020-2024

Target-target dalam Renstra Inspektorat Jenderal dituangkan dalam Perjanjian Kinerja pimpinan, dengan capaian sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH

IKK Inspektorat Wilayah	Itwil I		Itwil II		Itwil III		Itwil IV		Itwil V		Itwil VI	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Level IACM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Penerapan MR	76%	90%	56%	75%	56%	66,7%	56%	61%	35%	43,75%	56%	56,38%
TL Internal (TGR)	66%	78,67%	83%	99,5%	73%	83,2%	9%	88,33%	32%	31,24%	82%	82,21%
TL Internal (Administrasi)	86%	97,40%	86%	96,11%	86%	83,7%	86%	77,65%	94%	98,14%	86%	95,78%
TL BPK (TGR)	84%	88%	70%	74,57%	73%	90%	75%	78,95%	64%	64,12%	92%	99,47%
TL BPK (Administrasi)	80%	100%	80%	79,82%	80%	80,4%	80%	89,63%	80%	79,57%	80%	89,05%
WBK/WBBM	8%	16%	4%	4%	6%	16%	8%	12%	20%	20%	8%	32%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT ITJEN

IKK SEKRETARIAT ITJEN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
Pengelolaan UPP	1 rekomendasi	-	Pelaksanaan pengelolaan UPP unit Jawa Tengah dan Jawa Barat, dalam proses penyusunan Laporan UPP
Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	67	95,26	Berdasarkan hasil survei PMPI dengan hasil sebesar 95,26 (sangat baik), sedangkan hasil SPI KPK masih proses penilaian
Indeks RB Itjen	34,92	35,71	Berdasarkan hasil PMPRB Itjen
Nilai SAKIP Itjen	82,89	83,9	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Itjen
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	85%	100%	Bahwa pegawai Itjen sudah memenuhi standar kompetensi melalui pelaksanaan Ukom. Selain itu peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai
Tingkat internalisasi pegawai Itjen atas Tata Nilai Kemenkumham	4	-	Pelaksanaan internalisasi dan survei pegawai Itjen atas Tata Nilai Kemenkumham dan pengolahan data sedang berlangsung
Persentase pemenuhan pengembangan teknologi informasi yang menunjang proses bisnis bidang pengawasan / pengendalian internal	84%	90%	Dilaksanakan kegiatan yang menunjang pemenuhan pengembangan teknologi informasi untuk menunjang proses bisnis bidang pengawasan / pengendalian internal
Persentase realisasi layanan perkantoran yang akuntabel	87%	94,41%	Sesuai realisasi layanan perkantoran
Jumlah layanan fasilitas kerumahtanggaan, BMN, dan sarpras internal	12	12	Sesuai dengan terlaksana layanan kerumahtanggaan, BMN dan sarpras
Laporan keuangan Itjen yang akuntabel	WTP	WTP	Terbit bersamaan dengan opini BPK atas LK Kemenkumham
Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Itjen	88%	94,35%	Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana
Persentase fasilitasi pengelolaan tindak lanjut rekomendasi penyusunan RKA-KL Itjen	96%	100%	Seluruh tindak lanjut hasil revidi dan penelaahan atas RKAKKL ITJEN telah ditindaklanjuti



PENYELENGGARAAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Target Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Oktober	November	Desember
Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada Satker Kementerian Hukum dan HAM	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Implementasi Manajemen Risiko (MR) Maturitas SPIP	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Peningkatan Kapabilitas APIP Kemenkumham Level 4	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Tidak ada target B-10)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Pelaksanaan Pengawasan melalui Pendampingan, Reviu dan Audit terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi)	✓ (Tidak ada target B-10)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)

2. Capaian Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, SPIP, Manajemen Risiko, KAPIP dan SAKIP Inspektorat Jenderal



CAPAIAN LAINNYA PENYELENGGARAAN RB, SPIP, MR, KAPIP DAN SAKIP



NILAI
RB ITJEN

35,71



NILAI SPIP
KEMENKUMHAM

LEVEL 4
HASIL
PENILAIAN MANDIRI



NILAI MR
ITJEN

83,06



NILAI KAPIP
ITJEN

4,23
HASIL
PENILAIAN MANDIRI



NILAI SAKIP
ITJEN

83,9

3. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah



PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan internal pada Satuan Kerja (Satker) akan ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal. Kegiatan pengawasan intern meliputi kegiatan Assurance dan Consulting.

Rekapitulasi kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal s.d Desember 2022 telah dilaksanakan sebanyak 995 kegiatan dengan rincian 207 Audit, 168 Reviu, 111 Evaluasi, 95 Pemantauan, 72 Audit Tujuan Tertentu, 145 Pendampingan, 197 Pengawasan lainnya (Koordiansi Pimpinan, Sosialisasi, Pendampingan dan lainnya).



Data per 23 Desember 2022

B. CAPAIAN LAINNYA

1) Program Unggulan Th.2022

CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2022

1	AKTIF BELAJAR	Dilaksanakan sebagai implementasi <i>corporate university</i> mulai Januari s.d. Desember 2022 sebanyak 22 Materi, 66 JP menghadirkan narasumber kompeten dari internal Kemenkumham dan dari K/L terkait lainnya.
2	REMOTE AUDIT	Dilaksanakan kegiatan pengawasan internal dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi secara virtual dengan satuan kerja.
3	AUDIT BERBASIS RISIKO DAN AUDIT TEMATIK	Ditetapkan SE Irjen tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan –PKPT Berbasis Risiko sebagai dasar pelaksanaan audit berbasis risiko dan telah dilaksanakan Audit Tematik dengan tema pengelolaan mutasi dan promosi pegawai serta telah disampaikan rekomendasi untuk perbaikan.
4	3 M (MENYAPA, MENGAJARKAN & MENYADARKAN)	Dilaksanakan kegiatan 3 M oleh Pimpinan Tinggi Madya Inspektorat Jenderal dari Januari s.d Oktober 2022 sebanyak 17 Kegiatan yaitu pada Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sumatera Barat, DIY Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan
5	E-MAWAS VER. 2022	Progres penyelesaian 5 Modul bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal sebesar 80%

2) Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Ditahun ke 3 Th.2022 ini merupakan akhir dari masa kadaluarsa ISO 37001:2018 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO SMAP). Setelah dilakukan audit eksternal oleh Lembaga Audit Eksternal Tuv Nord telah ditetapkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil mempertahankan ISO dimaksud.



3) Komitmen Peningkatan Integritas



PENYELENGGARAAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN ANTI KORUPSI

1. Pelaksanaan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menggalakkan integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada Inspektorat Jenderal melalui sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Ahli Pembangun Integritas (API).
2. Membudayakan anti gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, melalui pelaksanaan pelatihan Anti Gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
3. Membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan PARA PIHAK sesuai kewenangan melalui Pelaksanaan integrasi Whistle Blowing System (WBS) dengan KPK.
4. Melakukan partisipasi aktif dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas oleh KPK dalam rangka pengukuran Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM.
5. Menyelenggarakan penandatanganan Piagam Pengawasan Audit atau (Audit Charter) dalam pelaksanaan kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan menggelorakan Piagam Kemerdekaan Pengawasan Internal yang Bermartabat.
6. Memperoleh dan mempertahankan sertifikasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) sebagai komitmen Inspektorat Jenderal atas Sikap Anti Korupsi.

22
SERTIFIKAT PENYULUH ANTI KORUPSI

22
SERTIFIKAT AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

21
PELATIHAN GRATIFIKASI

INTEGRASI WHISTLE BLOWING SYSTEM DENGAN KPK



Survei Penilaian Integritas

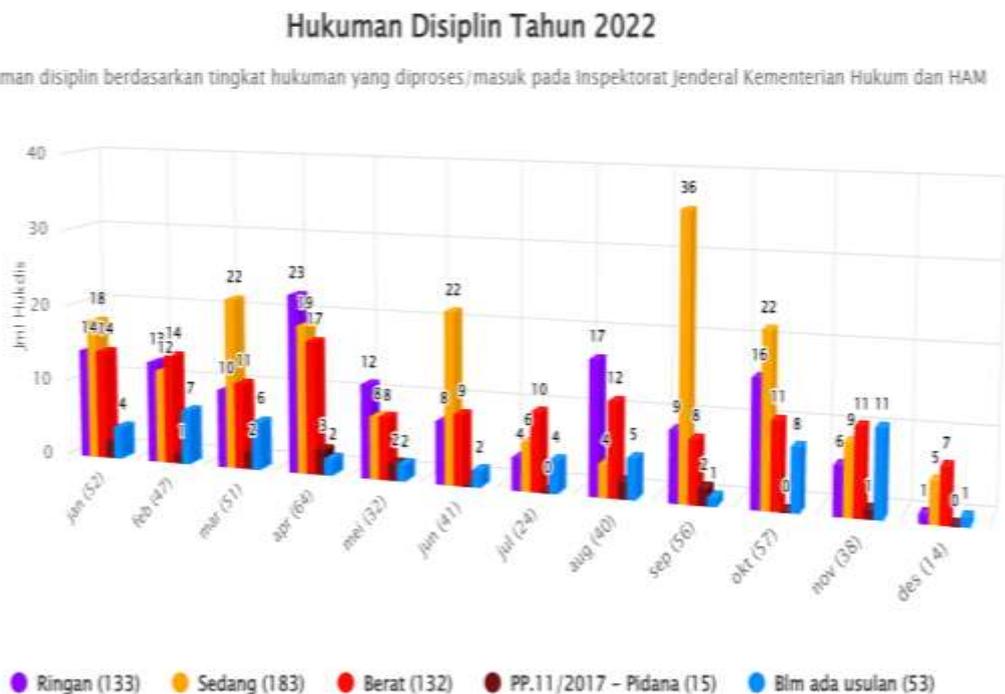
TAHUN 2020
81,93

TAHUN 2021
82,38

TAHUN 2022
78,48




4) Dukungan Pengelolaan Data Hukuman Disiplin



Total Hukuman Disiplin yang masuk/diproses, Tahun 2022: 516

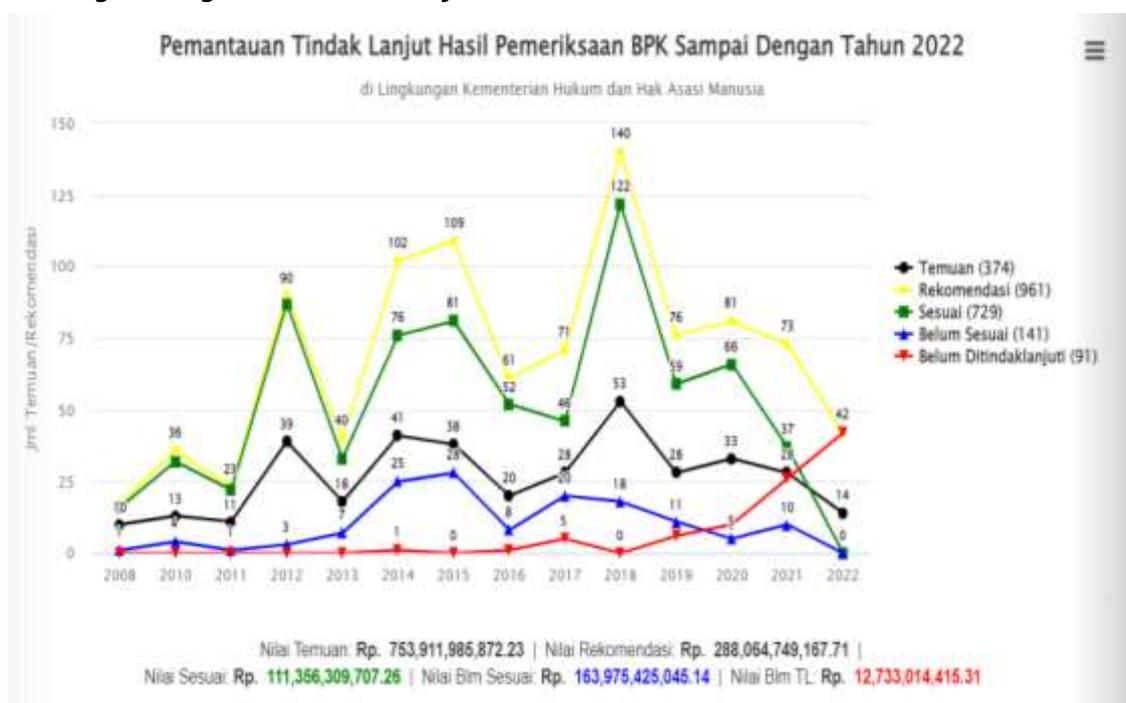
Sumber data : <https://itjenkumham.id/ds/> per 28 Des 2022

5) Dukungan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat



Sumber data : <https://itjenkumham.id/ds/> per 28 Des 2022

6) Dukungan Pengelolaan Tindakanjuit Temuan BPK

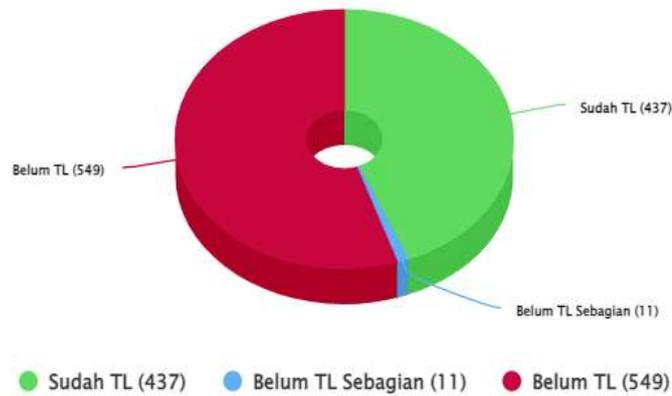


Sumber data : <https://itjenkumham.id/ds/> per 28 Des 2022

7) Dukungan Pengelolaan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan APIP

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ITJEN Sampai Dengan Tahun 2022

di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Nilai Temuan: Rp. 331,389,276,121.07 (997)

Nilai Sudah TL: Rp. 102,353,407,394.24 | Nilai Belum TL: Rp. 229,035,868,726.83

Sumber data : <https://itjenkumham.id/ds/> per 28 Des 2022

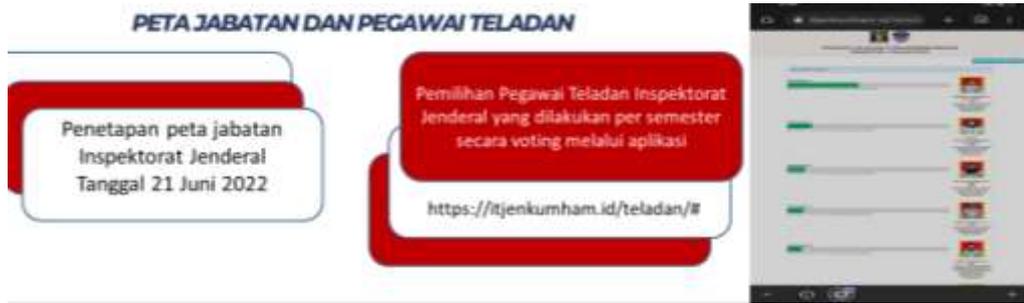
8) Dukungan Pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

LHKASN KEMENKUMHAM		LHKPN ITJEN				
TAHUN	PRESENTASE	No	TAHUN PELAPORAN	JUMLAH WL	YANG MELAPOR	KEPATUHAN
2020	97.78%	1.	2021	117	117	100%
2021	98.50%	2.	2022	143	143	100%
2022	100%					
KENAIKAN	1,50%					

9) Penyusunan Peraturan perundangan yang diinisiasi Inspektorat Jenderal, sebagai berikut :



10) Penetapan peta Jabatan dan Pemilihan Pegawai Teladan



11) Survei Layanan Internal Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat Jenderal merupakan output dari Kegiatan Dukungan Manajemen, dilaksanakan melalui survei pada website itjen.kemenkumham.go.id berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3141/X/2022 Tanggal 23 Oktober 2022, pelaksanaan survei berlangsung dari tanggal 2 s.d. 23 November 2022, berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh Indeks sebesar **4,82**. (LHP Survei Layanan Kesekretariatan tanggal 17 Desember 2022).

No	Unit Kerja	RESPONDEN	PPL	KEPEG	KEU	UMUM	SIP	NILAI AKHIR
1	Inspektorat Wilayah	66	2.860	2.736	2.929	2.877	2.859	14.261
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	22	975	1.010	972	902	967	4.826
JUMLAH TOTAL		88	3.835	3.746	3.901	3.779	3.826	19.087
NILAI RATA-RATA			426,11	416,22	433,44	419,89	425,11	424,16
NILAI SURVEI SKALA 6			4,84	4,73	4,93	4,77	4,83	4,82
NILAI SURVEI SKALA 3			2,42	2,36	2,46	2,39	2,42	2,41
NILAI SURVEI SKALA 100			80,70	78,83	82,09	79,52	80,51	80,33
BAIK SEKALI								

12) Survei Internalisasi Tata Nilai

Pelaksanaan survei dilakukan pada Bulan Desember 2022. Dan berdasarkan Laporan Internalisasi Tata Nilai tanggal 12 Desember 2022 diperoleh indeks 4.26 (sangat baik)

REKAPITULASI RESPONDEN TATA NILAI INTEGRITAS INSPEKTORAT JENDERAL 2022									
No	Unit Kerja	Kode	Total Responden	PROFESIONAL	AKUNTABEL	SINERGI	TRANSPARAN	INOVATIF	NILAI AKHIR
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
1	Inspektorat Wilayah	A1	131	1.674	1.665	1.667	1.113	1.627	7.746
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	A2	61	803	800	798	535	781	3.717
JUMLAH TOTAL			192	2.477,00	2.465,00	2.465,00	1.648,00	2.408,00	11.463,00
NILAI RATA-RATA				825,67	821,67	821,67	824,00	802,67	818,79
NILAI SURVEI SKALA 5				4,30	4,28	4,28	4,28	4,30	4,26
NILAI SURVEI SKALA 100				86,01	85,59	85,59	85,83	83,61	85,29

13) Survei Persepsi Satuan Kerja atas Kinerja Pengawasan APIP

Bahwa berdasarkan survei online Persepsi Satuan Kerja atas Kinerja APIP yang telah dilaksanakan tanggal 23 Februari s.d 8 Maret 2022 untuk periode pelaksanaan pengawasan APIP Januari Th.2021 s.d Februari Th.2022, memperoleh indeks **85,95- Kategori Sangat Baik (skala 100)**. Dengan nilai per unsur :

No	Indikator	Nilai /Indeks
1	Hubungan Budaya Organisasi	87,52
2	Obyektifitas dan perilaku Profesional	92,92
3	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	139,67
4	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	140,07
5	Komunikasi Hasil Pengawasan	186,11
6	Pemantauan Tindakanjuz Hasil Pengawasan	93,48

14) Pengembangan aplikasi E-MAWAS Versi 2022 bersama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Progres E-MAWAS s.d Desember telah selesai 8 modul (100%) namun demikian belum dapat dilaunching karena masih akan dilakukan *trial and error* sampai benar-benar E-MAWAS dapat digunakan. Progres finalisasi dilanjutkan di tahun 2023.

15) Pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengawasan Internal dalam Internalisasi *Core Value* Ber-AKHLAK untuk menjaga Keagungan Kementerian Hukum dan HAM sekaligus memperingati Hari Jadi Inspektorat Jenderal ke-56 Tahun 2022 dengan mengusung tema “APIP BerAKHLAK KEMENKUMHAM Bermartabat” pada tanggal 3 November 2022.

16) Pengembangan Kompetensi Pegawai.

17) Bahwa pegawai Inspektorat Jenderal sudah memenuhi standar kompetensi melalui pelaksanaan Ukom. Selain itu, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan untuk pegawai, sebanyak 47 jenis Diklat, 18 materi aktif belajar (66 JP), 14 kali/materi *workshop*, dengan rincian :

Jenis Pengembangan Kompetensi	Nama Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta (pegawai)
DIKLAT	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan I – IV	3
	Pelatihan Tim Assessor PMPRB	2
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan I	3
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan III	4

	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan IV	4
	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan V – VIII	1
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan VII	4
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan VI	5
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan V	6
	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer	30
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara E-learning	5
	Pelatihan Pelatihan Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Angkatan II	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga secara E-learning	21
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga secara E-learning	20
	Pelatihan Kapabilitas APIP K/L Mitra Kerja Deputy Bidang PIP Bidang Polhukam PMK	4
	e-learning Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	3
	Pelatihan Analisis Dasar Penganggaran Tahun 2022 dengan metode Elearning	1
	Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bagi Kementerian/ Lembaga	1
	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Keahlian Angkatan I	1
	Pembelajaran Mandiri Melalui Aplikasi Massive Open Online Course (MOOC) bagi CPNS	4
	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level Angkatan I	3
DIKLAT	Pelatihan Elearning dan Microlearning pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu learning Center Generasi Ke2 (KLC-2) dengan metode tatap muka	4
	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIV – XVIII Metode Pembelajaran Jarak Jauh	4
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1

	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Batch 5A	1
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Auditor IT	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	8
	Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan Angkatan I	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1	2
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch IV	1
	Pelatihan Keprotokolera n di Lingkungan Inspektorat Jenderal	20
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch V	2
	Pelatihan Audit Jasa Konstruksi	27
	Pelatihan Kepemimpina n Nasional Tingkat II Angkatan XXIII	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	1
	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode eLearning Angkatan XIX – XXII	3
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch 8	3
	Pembelajaran E-Learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX	2
	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar Metode eLearning	4
	Diklat Auditor TIK	2
	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan Metode eLearning	2
Diklat	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Expert (CGAE) Batch IV	2
	Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Madya	4
	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar Metode e-Learning Angkatan VXXVII	2
	Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Madya	5
Aktif Belajar	Remote Audit	

	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Tender Dini (Pra-DIPA) Pengadaan Bahan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	Seluruh pegawai
	Implementasi SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM (Evaluasi Hasil, Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas)	
	Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	
	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	Audit Investigatif	
	Isu perubahan/regulasi terkait Administrasi Hukum Umum	
	Evaluasi Manajemen Resiko	
	Gratifikasi	
	Kampanye anti korupsi	
	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	
	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
	Penanganan Overstay Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Halinar (Hp, Pungli Dan Narkoba) Pada Lapas Dan Rutan	
	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Pengadaan Barang Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas	
	Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	
	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara	
	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
	Implementasi SDP dalam Mendukung Audit Kinerja atas Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan	
	Pemanfaatan Penelusuran Rekam Jejak Digital Sebagai Bukti Audit	
Aktif Belajar	Penerapan Kerangka Integritas	
	Audit atas Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung Bangunan	
Workshop	Kiat-Kiat Peningkatan Nilai Komponen Pengungkit dalam Rangka PMPRB Kemenkumham Tahun 2022	Seluruh pegawai
	Persiapan Pendampingan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	

	Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM	
	Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	
	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM Menuju Level 4	
	Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Secara Berjenjang Melalui Aplikasi ERB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
	Persiapan Evaluasi TPI Atas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	
	Administrator Aplikasi SIMWAS Inspektorat Jenderal Versi 3.0 dan SIPIDU pada Unit Utama dan Pusdatin	
	Internalisasi Audit Teknologi Informasi	
	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2024	
Pelatihan Kantor Sendiri	Implementasi PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh pegawai
	Teknis Penulisan Jurnalistik (Hard News, Soft News, dan Teknik Wawancara) dan Teknik Fotografi Berita	
	Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	

18) Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan

Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Wilayah dan realisasi Program Kerja Administrasi Umum selengkapnya dituangkan dalam Laporan berkala (Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan).

19) Pengelolaan Barang Milik Negara

Sampai dengan desember Th.2022 Barang Milik Negara yang dikelola Inspektorat Jenderal meliputi :

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN

ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 23/12/2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBSTSSKT

NAMA UAKPB : 013.02.0199.409241 - INSPEKTORAT JENDERAL

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		8	2,587,580,458	1	96,855,000	0	0	9	2,684,435,458
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD		8	2,587,580,458	1	96,855,000	0	0	9	2,684,435,458
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		4	1,194,237,000	0	0	0	0	4	1,194,237,000
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD		4	1,194,237,000	0	0	0	0	4	1,194,237,000
TOTAL				3,781,817,458		96,855,000		0		3,878,672,458

Tanggal : 23/12/2022

Halaman : 1 dari 2

Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 013.02.0199.409241 - INSPEKTORAT JENDERAL

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			01-JANUARI-2022		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		3,115	24,438,998,397	7	226,600,000	20	2,201,471,000	3,102	22,464,127,397
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		41	5,202,082,764	0	0	20	2,201,471,000	21	3,000,611,764
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK		2	4,600,000	0	0	0	0	2	4,600,000
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1	797,500	0	0	0	0	1	797,500
3.03.03	ALAT UKUR		12	15,240,000	0	0	0	0	12	15,240,000
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		10	29,810,000	0	0	0	0	10	29,810,000
3.05.01	ALAT KANTOR		301	2,993,913,700	0	0	0	0	301	2,993,913,700
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1,872	6,201,706,942	0	0	0	0	1,872	6,201,706,942
3.06.01	ALAT STUDIO		36	203,722,736	0	0	0	0	36	203,722,736
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		39	40,098,000	0	0	0	0	39	40,098,000
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		2	666,000	0	0	0	0	2	666,000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		11	51,999,001	0	0	0	0	11	51,999,001
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		97	181,390,000	0	0	0	0	97	181,390,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		500	7,175,700,323	7	226,600,000	0	0	507	7,402,300,323
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		190	2,317,471,431	0	0	0	0	190	2,317,471,431
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		1	19,800,000	0	0	0	0	1	19,800,000
133111	Gedung dan Bangunan		5	1,993,629,000	0	0	0	0	5	1,993,629,000
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		2	480,752,000	0	0	0	0	2	480,752,000
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		3	1,512,877,000	0	0	0	0	3	1,512,877,000
135121	Aset Tetap Lainnya		1	43,333	0	0	0	0	1	43,333
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		1	43,333	0	0	0	0	1	43,333

Tanggal : 23/12/2022

Halaman : 2 dari 2

Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 013.02.0199.409241 - INSPEKTORAT JENDERAL

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			01-JANUARI-2022		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		528	1,159,170,721	13	1,172,888,000	0	0	541	2,332,058,721
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		0	0	13	1,172,888,000	0	0	13	1,172,888,000
3.05.01	ALAT KANTOR		58	455,706,450	0	0	0	0	58	455,706,450
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		20	89,358,530	0	0	0	0	20	89,358,530
3.06.01	ALAT STUDIO		1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		21	27,700,000	0	0	0	0	21	27,700,000
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		1	4,048,000	0	0	0	0	1	4,048,000
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		1	880,000	0	0	0	0	1	880,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		28	333,582,910	0	0	0	0	28	333,582,910
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		50	219,900,340	0	0	0	0	50	219,900,340
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		348	26,014,491	0	0	0	0	348	26,014,491
TOTAL				27,591,841,451		1,399,488,000		2,201,471,000		26,789,858,451

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bahwa selama Tahun 2022 Inspektorat Jenderal mengemban :

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.
2. Tujuh Kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.
3. Sasaran dan target Program serta Kegiatan ditetapkan dalam Indikator Kinerja dan dalam Perjanjian Kinerja.
4. Kinerja yang dicapai meliputi :
 - a) Tercapainya target IKU-IKK dan Perjanjian Kinerja;
 - b) Tercapainya target Program Unggulan;
 - c) Pengelolaan penyelenggaraan SPIP dilingkungan Inspektorat Jenderal, data dukungnya dituangkan dalam Laporan Triwulan dan Akhir Tahun;
 - d) Pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, data dukungnya dituangkan dalam e-pmprb dan e-rb online;
 - e) Menyelenggarakan Manajemen Risiko tingkat Program dan Kegiatan, Manajemen Risiko Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko Pencegahan dan penanganan Covid-19 dilingkungan Inspektorat Jenderal;
 - f) TARJA Inspektorat Jenderal terpenuhi targetnya per triwulan dan tidak ada nilai merah;
 - g) Pengelolaan pengisian monev kinerja SMART (penilaian oleh DJA-Kemenkeu), monev RKP (penilaian oleh Bappenas) dan e-performance (penilaian oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham);
 - h) Pelaksanaan Pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya) atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Kemenkumham;
 - i) Menyusun dokumen anggaran Tahun 2022 meliputi DIPA dan RKAKL, PKPT dan PKAU, *disbushement plan*, *procurement plan*, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Kebijakan pengawasan dan TARJA Inspektorat Jenderal Th.2022;
 - j) Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat, FGD, PKS, *Workshop*, BIMTEK, Sosialisasi dan studi banding;
 - k) Pengelolaan sarana prasarana penunjang kinerja, pengelolaan BMN dan pengelolaan persuratan serta arsip;

- l) Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- m) Pengelolaan gaji, tunjangan, keuangan kegiatan, pajak dan kartu kredit pemerintah;
- n) Pengelolaan data pelaporan gratifikasi, pengaduan masyarakat, pungutan liar, temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan serta pengelolaan teknologi informasi;
- o) Pengelolaan kehumasan, publikasi berita, data Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta *website*, media social dan media koran online;
- p) Pengelolaan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Perjanjian Kinerja;
- q) Penyusunan Kebijakan Anti Penyuapan dan Sertifikasi ISO 37001:20016 *Anti Bribery Management System*;
- r) Pengelolaan LHKASN Pegawai Kemenkumham;
- s) Menyelenggarakan SPBE dengan melaksanakan upgrade SIMWAS menjadi E-MAWAS;
- t) Pengelolaan Layanan Konsultasi (tatap muka dan e-consul);
- u) Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas, sebagai data untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan HAM dan IKU Inspektorat Jenderal;
- v) Melaksanakan survei layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai dasar untuk mengukur Indikator Kinerja Output Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- w) Malaksanakan survei Internalisasi Tata Nilai serta bimbingan rohani sebagai dasar untuk mengukur salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal;
- x) Dalam Perencanaan Kinerja, Sekretariat Inspektorat Jenderal turut aktif dalam penyusunan penyesuaian RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi dari KemenpanRB. Rekomendasi terkait Misi, Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja di level Kementerian;
- y) Mengelola DIPA sebesar Rp60.225.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp59.499.808.185,- (98,59%) per data SAKTI tanggal 29 Desember 2022.

Keberhasilan kinerja tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Inspektorat Jenderal baik sumber daya manusia, sumber daya peraturan maupun sumber daya sarana prasarana, dengan meningkatkan koordinasi, kerjasama antar Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Wilayah, antar satuan kerja di lingkungan Kemenkumham maupun antar Instansi terkait lainnya.

B. KENDALA

1. Belum terintegrasinya data antara Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah;
2. Terdapat kekosongan Jabatan Subkoordinator pada bagian SIP, PPL dan Keuangan serta minimnya Jumlah Pelaksana pada bagian Inspektorat Wilayah dan Bagian sehingga menyebabkan Krisis SDM yang disebabkan belum optimalnya Tusi bagian Kepegawaian dalam melakukan mutasi lintas bagian, Satuan Kerja, Pengangkatan Pejabat Auditor dikarenakan belum tersusunnya ABK (Analisis Beban Kinerja);
3. Aplikasi SiSUMAKER belum dapat berjalan dengan optimal dikarenakan belum dapat diakses dengan cepat, terutama dalam verifikasi oleh pengendali teknis;
4. Jaringan Internal (Wi-Fi) tidak stabil sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan daring seperti *Workshop* ataupun aktif belajar;
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal;
6. Kegiatan *mandatory* mengalami pengunduran jadwal kegiatan sehingga mempengaruhi perencanaan penugasan lainnya (PKPT dan Non-PKPT);
7. Masih terdapat satuan kerja yang belum mengirimkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negara maupun administrasi;
8. Pelaksanaan program pengawasan seringkali bertabrakan atau berdekatan dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas di lingkungan Inspektorat Wilayah sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi kesehatan pegawai dan/atau keluarganya;
9. Pelaksanaan penugasan yang padat dan berkelanjutan sehingga harus dilakukan kontrol atas laporan hasil penugasan dan pertanggungjawaban dapat diselesaikan secara tertib;
10. Belum maksimalnya JFT Arsiparis dalam pengelolaan arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal.

C. SARAN

1. Komitmen dan dukungan Pimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Jenderal lebih PASTI serta Kerjasama yang solid sangat diperlukan terutama di internal Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan seluruh kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Sekretariat Inspektorat Jenderal baik sumber daya manusia, sumber daya peraturan maupun sumber daya sarana

- prasarana, dengan meningkatkan koordinasi, kerja sama antar Bagian dan Kelompok Substansi.
3. Peningkatan internalisasi tata nilai Kemenkumham dan rasa memiliki, rasa tanggung jawab atas tugas, fungsi dan keberhasilan kinerja Inspektorat Jenderal untuk mendukung keberhasilan kinerja Kemenkumham di Tahun yang akan datang.
 - 2) Perlu dibuat sistem terintegrasi antara Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Wilayah.
 - 3) Segera menyusun ABK (Analisis Beban Kinerja) sebagai dasar untuk mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia untuk dapat segera mendapatkan respon dari pemangku kepentingan, diantaranya dengan mengajukan surat permintaan pegawai dari satuan kerja untuk penempatan di Inspektorat Jenderal dan melakukan mutasi dan promosi sesuai dengan kebutuhan dalam ABK (analisis beban kinerja).
 - 4) Agar dilakukan monitoring terkait aplikasi SiSUMAKER pada Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan.
 - 5) Agar bagian umum dapat memonitor terkait Wi-Fi secara berkelanjutan.
 - 6) Perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat berjalan optimal.
 - 7) Perlu pembagian tugas yang lebih rinci untuk mempercepat kinerja, menyusun ulang pembagian kerja pegawai untuk melakukan percepatan penyelesaian *pending job* dan mengantisipasi potensi mundurnya realisasi penugasan yang berdampak bagi kualitas *output* dan *outcome* kinerja.
 - 8) Melaksanakan koordinasi kepada Satuan Kerja terkait proses tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan secara berkala.
 - 9) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 dan penyesuaian dengan kebijakan *Automatic Adjustment* sehingga Target Kinerja dapat tercapai.
 - 10) Melakukan kontrol atas pelaporan kegiatan pengawasan dan keuangan agar dapat segera diselesaikan.
- 11) Menempatkan JFT Arsiparis pada tiap Inspektorat Wilayah dan Bagian untuk

memaksimalkan penataan data arsip agar lebih rapi dan tertib.



Jakarta, 30 Desember 2022
Sekretaris Inspektorat Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Natanegara K.P.', written over a horizontal line.

R.Natanegara K.P.
NIP 197309081999031001